Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 1	Hal: 27 - 39	April 2020
---	--	--------------	--------------	------------

DEFORESTASI DAN MIGRASI PENDUDUK KE IBU KOTA BARU KALIMANTAN TIMUR: PERAN SINERGIS PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

Aufa Hanum Salsabila¹, Nunung Nurwati^{2*}

^{1, 2} Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

*korespondensi: *nngnurwati@yahoo.co.id*

ABSTRAK

Pada 26 Agustus 2019, Presiden Republik Indonesia telah mengumumkan rencana pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur. Indikator pemilihan kandidat ibu kota baru berdasarkan oposisi dari permasalahan yang dihadapi DKI Jakarta, yaitu situasi terlalu padat menimbulkan permasalahan macet, polusi, rentan banjir, dan masalah geografis seperti dataran yang sudah menurun serta dekat dengan zona tumbukan lempeng.

Muncul tanggapan dari berbagai pihak, meski salah satu alasan pemilihan terkait rencana ibu kota baru di Kalimantan Timur karena tidak rawan bencana alam namun terdapat isu masalah lingkungan hidup yang sering terjadi yaitu, deforestasi. Rencana ini akan meningkatkan potensi deforestasi—hutan gambut sebagai vegetasi mayoritas merupakan area rawan terbakar. Kemungkinan masifnya migrasi penduduk tanpa perencanaan proteksi lingkungan melalui masyarakat itu sendiri nantinya mengakibatkan potensi deforestasi besar-besaran karena ekspansi wilayah menurunkan kuantitas hutan dan berdampak pada satwa langka yang tinggal di dalam nya.

Peningkatan deforestasi besar-besaran karena potensi migrasi penduduk yang masif akan terjadi karena adanya interaksi ekonomi dengan penduduk setempat yang akan melakukan ekspansi lahan untuk pertanian, serta kegiatan berburu dan menangkap ikan yang menggunakan api sebagai salah satu keperlunya. Aktivitas ekonomi ini berada pada atau dekat dengan area hutan gambut yang memudahkan api menjalar lebih cepat dan besar, ditambah dengan isu perubahan iklim yang terjadi membuat pemadaman kebakaran hutan ini lebih sulit dapat menghentikan aktivitas ibu kota baru dalam jangka waktu yang lama serta kabut asap yang dihasilkan dapat bertahan lebih lama dan berimbas pada masalah kesehatan dan ekonomi masyarakat.

Sehingga perlu peran sinergis antara pemerintah dan masyarakat, melalui perspektif disiplin kesejahteraan sosial dengan menggunakan pendekatan pengorganisasian masyarakat (*community organizing*) yakni perencanaan dan kebijakan sosial di mana pemerintah perlu membuat kebijakan penghijauan kembali bersama masyarakat (*community restoration policies*) serta pemberdayaan masyarakat melalui *locality development*.

Artikel ini melalui perspektif disiplin kesejahteraan sosial dengan menggunakan pendekatan pengorganisasian masyarakat akan membahas pengaruh potensi migrasi penduduk yang masif pada peningkatan deforestasi terkait rencana pemindahan ibu kota di Kalimantan Timur.

Kata kunci: deforestasi, migrasi, mobilitas penduduk, perencanaan dan kebijakan sosial, *community organization*, *locality development*

ABSTRACT

On August 26th, 2019, the president of Republic of Indonesia has announced the plan to move the capital city to East Kalimantan with two options of the area. The indicator of where the capital city might be is based upon the opposite of what the city of Jakarta has its issues on, the most remaining one is that the city has become too crowded and led all the traffic, heavy pollution, prone to flood, located close to plate collision zone, and parts of the it are slowly sinking to the sea.

Many reactions have emerged, though one of the reasons behind the decision to move the capital to East Kalimantan are because it has the least risk of the earthquakes, but there is a regular environmental problem,

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 1	Hal: 27 - 39	April 2020
---	--	--------------	--------------	------------

which is, deforestation. This plan will elevate the potential of deforestation—peatlands, as the major vegetation there, are known to be flammable. Hence the rapid migration that happen later to the future capital without proper plan of environmental protection from the government and through its own people, will later result in the heavy potential of deforestation out of the expected area expansion that will reduce the quantity of the forests and impact to the endangered yet native animals of the island.

The possibility of massive migration will result in massive increasing of deforestation happens out of economic interaction with the local community that might do land expansion for agriculture, along with the hunting and fishing activities that would use fire as the necessity. This economic activity will be around or close to the peatlands area that easily creates fire to spread faster and bigger, plus a climate change issue that is happening now would make the forest fires last longer thus more difficult to suppress, this will cease the activity in the future capital in a long period of time, add along and tag along the acrid haze that comes after will make it stay longer and would impact on health issue and economic instability for the community living there.

Hence, the issue needs a synergic role between the government and the community, where the government is obliged to establish the community restoration policies and provide the community development through locality development.

This article through perspective of social work using community organizing approaches through social planning and policy and locality development will discuss the impact of potential massive migration on the elevating deforestation in regards moving the capital to East Kalimantan.

Keywords: *deforestation, migration, population mobility, social planning and policy, community organization, locality development*

PENDAHULUAN

Pada 26 Agustus 2019, dilansir oleh Reuters (Agustinus Beo Da Costa, 2019), Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmi mengumumkan rencana pemindahan ibu kota Indonesia dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, saat itu diumumkan terdapat dua pilihan kandidat ibu kota yakni Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara. Rencana ini ditetapkan untuk menggantikan Kota Jakarta yang sudah terlalu penuh, berpolusi, rentan banjir, macet lalu lintas, memiliki resiko bencana terutama gempa bumi, dan saat ini datarannya secara perlahan mulai tenggelam yang merupakan hasil penelitian berbagai pihak (Manik & Marasabessy, 2010).

Sedangkan wilayah Kalimantan sesuai pernyataan tertulis Kepala BMKG Dwrikorita Karnawati bahwa walau terdapat struktur sesar dan memiliki catatan aktivitas gempa bumi, tetapi secara umum wilayah Pulau Kalimantan masih relatif lebih aman jika dibanding daerah mau pun pulau-pulau besar lain di Indonesia yang memiliki sejarah gempa yang merusak dan menimbulkan korban jiwa sangat besar, kondisi seismisitas yang relatif rendah karena wilayah Kalimantan memiliki jumlah struktur sesar aktif yang jauh lebih sedikit daripada pulau-pulau lain di Indonesia, lalu wilayah Pulau Kalimantan lokasinya cukup jauh dari zona tumbukan lempeng (*megathrust*), serta kondisi beberapa struktur sesar di Kalimantan sudah

berumur tersier sehingga segmentasinya banyak yang sudah tidak aktif lagi dalam memicu gempa (Eva Safitri, 2019).

Namun, meski Pulau Kalimantan secara sejarah tidak memiliki kecenderungan terhadap gempa bumi yang besar, namun Pulau Kalimantan sebagai salah satu kawasan hutan tropis dataran rendah memiliki area hutan gambut yang rawan terbakar dan telah banyak dialihfungsikan menjadi lahan pertanian dan perkebunan (Yusuf, 2003). Tanaman gambut yang berpotensi meningkatkan resiko kebakaran hutan, yang akan menimbulkan kerusakan lingkungan dan melepaskan banyak emisi gas rumah kaca—pemindahan ibu kota juga tidak akan menyelesaikan masalah kerusakan lingkungan di Jakarta (Tacconi, 2019).

Wilayah yang diusulkan sebagai ibu kota baru tidaklah jauh dari Sungai Mahakam, area yang penuh dengan hutan gambut dan rumah dari lumba-lumba air tawar lokal (*Orcaella brevirostris*) atau yang lebih dikenal sebagai pesut Mahakam (Minton dkk, 2017). Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, area hutan gambut memiliki kecenderungan mudah terbakar, dan menjadi penyebab utama dari terjadinya kabut tebal yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.

Pemindahan ibu kota berarti membuka lahan untuk membuat ruang untuk bangunan-bangunan pemerintahan baru, rumah-rumah dan

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 1	Hal: 27 - 39	April 2020
---	--	--------------	--------------	------------

infrastruktur terkait lainnya, dilansir oleh Reuters (2019) dan BBC Indonesia (2019) diperkirakan pemerintah telah menetapkan seluas 180.000 hektar yang dibutuhkan untuk konstruksi.

Setidaknya ibu kota baru ini diperkirakan dapat menampung sekitar 1.5 juta jiwa penduduk—di antaranya sekitar 180 ribu pegawai negeri diminta untuk pindah ke ibu kota baru dilansir dari CNBC Indonesia (2019) dan BBC Indonesia (2019), itu di atas dampak lingkungan dari jumlah populasi saat ini—terdapat kurang dari 900.000 masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Paser Penajam menurut (DKP3A Kaltim, 2019).

Ini yang menyebabkan kelompok-kelompok aktivis lingkungan seperti Greenpeace Indonesia (2019) khawatir terkait rencana pemindahan ibu kota yang sangat akan berdampak pada hutan-hutan serta banyak spesies hewan endemik atau yang tinggal di sana, seperti orangutan.

Populasi yang sangat besar yang dekat dengan Sungai Mahakam dapat meningkatkan resiko kebakaran hutan gambut yang berada tidak jauh dari sana. Arus masuk para migran menuju ibu kota baru dapat mendorong ekspansi pertanian, yang mengakibatkan masyarakat tetap sering membakar lahan demi ekspansi pertanian di Indonesia terlepas dari larangan penggunaan api untuk membuka lahan yang ada pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Luca Tacconi yang merupakan seorang pengajar tata kelola lingkungan dan peneliti dari Australian National University mengenai kebakaran hutan di Indonesia pada 2005 (Tacconi, 2005) dan kabut asap di Asia Tenggara pada tahun 2016 (Tacconi, 2016), dijelaskan bahwa kebakaran hutan di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan aktivitas pertanian saja, tapi juga aktivitas mata pencaharian seperti kegiatan berburu dan memancing—berdasarkan informasi dari Dinas Komunikasi dan Informasi Kalimantan Timur (2017) banyak yang melakukan aktivitas tersebut dengan metode-metode ilegal yang berimbas pada kebakaran hutan mau pun kerusakan lingkungan alam.

Masyarakat setempat yang tinggal di area tersebut akan berburu dan menangkap ikan lebih banyak dan menjualnya pada masyarakat kota, yang nantinya juga akan mengunjungi hutan dan

kawasan gambut untuk rekreasi dan untuk mendapatkan mata pencaharian.

Walau tidak menggunakan metode ilegal, ketika masyarakat berburu dan menangkap ikan saat musim kemarau, mereka sering membuat api unggun dan membakar tumbuhan untuk mencari kolam pemancingan, api dapat menyebar dan menyebabkan kebakaran hutan (Akbar, 2016).

Dengan terjadinya isu pemanasan iklim, keadaan suhu bumi menjadi meningkat seiring waktu, sehingga aktivitas di ibu kota baru dapat terhenti selama berbulan-bulan—terlebih api serta kabut asap yang dihasilkan dapat berimbas pada masalah kesehatan dan ekonomi masyarakat setempat (Akbar, 2016).

METODE ARTIKEL

Artikel ini merupakan kajian literatur untuk mengurai konsep dan teori yang relevan dalam menjelaskan pengaruh migrasi penduduk terkait rencana pemindahan ibu kota terhadap peningkatan deforestasi di Kalimantan Timur. Pembahasan mengenai peran yang dapat dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi kemungkinan peningkatan deforestasi akibat peningkatan migrasi penduduk melalui indikator karakteristik dari mobilitas penduduk dengan menggunakan teknik intervensi masyarakat yang dikonsepkan oleh Rothman (1968), yakni kebijakan sosial dan *locality development*. Kebijakan sosial yang diterapkan dapat melalui kombinasi kebijakan penghijauan kembali bersama masyarakat serta pendekatan pengembangan perdesaan (*rural development*) yang merupakan pendekatan yang diinisiasikan oleh Shanta (1996).

Alasan utama menggunakan pendekatan pengembangan perdesaan adalah karena keadaan masyarakat dan wilayah kandidat ibu kota baru bukan merupakan wilayah urban, misal seperti Kota Jakarta yang merupakan area urban, sehingga pendekatan ini dirasa paling sesuai dengan situasi masyarakat di sana.

Sumber data dan informasi dalam penelitian adalah berbagai jurnal, buku, dan laporan resmi yang kredibel dan bisa diandalkan terkait dengan deforestasi dan mobilitas penduduk—adaptasi interaksi penduduk migran dan penduduk setempat.

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 1	Hal: 27 - 39	April 2020
---	--	--------------	--------------	------------

PEMBAHASAN

Migrasi Penduduk

Migrasi merupakan bentuk dari mobilitas penduduk horizontal atau yang sering juga disebut dengan mobilitas penduduk geografis Mantra (2013), yang menurut Mantra (1978) adalah gerak penduduk yang melintasi batas wilayah menuju ke wilayah yang lain dalam periode waktu tertentu. Migrasi merupakan mobilitas penduduk yang bersifat permanen, artinya penduduk ini pindah dan menetap di wilayah baru selama enam bulan atau lebih (Mantra, 2013).

Umumnya dapat dikatakan bahwa mobilitas penduduk terjadi ketika terdapat perbedaan nilai-nilai kefaedahan antara dua wilayah (Mantra, 2013).

Lee (1966) dalam Mantra (2013) dalam tulisan yang bertajuk *A Theory of Migration* menerangkan bahwa volume migrasi di suatu wilayah berkembang sesuai dengan tingkat keragaman daerah di wilayah tersebut. Menurut Lee (1966) terdapat tiga faktor di daerah asal mau pun daerah tujuan mengenai hal ini, yaitu, faktor positif (+), faktor negatif (-), serta faktor neutral (o).

Faktor positif (+) merupakan faktor yang memberikan nilai menguntungkan jika bertempat tinggal di wilayah itu, misal, faktor sarana dan infrastruktur yang mendukung serta faktor geografis daerah.

Faktor negatif (-) merupakan faktor yang memiliki nilai negatif jika daerah tersebut dijadikan tempat tinggal, sehingga seseorang ingin pindah dari daerah tersebut karena kebutuhan-kebutuhan untuk berkehidupannya tidak terpenuhi.

Lee (1966) juga mengatakan bahwa besar kecilnya arus migrasi dipengaruhi oleh rintangan yang menghadang (*intervening obstacles*), misal biaya pindah yang tinggi, topografi wilayah daerah asal dan daerah tujuan yang drastis, sarana publik yang terbatas, serta pajak yang tinggi. Lalu, faktor yang paling signifikan ialah faktor individu, karena individu itu sendiri yang dapat menentukan sesuai atau tidaknya daerah yang dituju. Dapat disimpulkan bahwa menurut Lee (1966) terdapat empat faktor penting yang mempengaruhi proses migrasi terjadi, yaitu:

1. Faktor individu
2. Faktor-faktor yang terdapat di daerah asal

3. Faktor-faktor yang terdapat di daerah tujuan, dan
4. Rintangan yang menghadang (*intervening obstacles*) antara daerah asal dengan daerah tujuan.

Namun menurut Norris (1972) diagram Lee yang menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi perlu ditambah dengan tiga komponen yaitu migrasi kembali, kesempatan antara (*intervening opportunities*), dan migrasi paksaan (*force migration*). Jika Lee beranggapan bahwa faktor individu adalah faktor yang paling signifikan, maka Norris beranggapan bahwa faktor yang terdapat di daerah asal merupakan faktor terpenting. Karena di daerah asal tersebut, seseorang bertumbuh kembang menjadi dewasa, memiliki interaksi-interaksi sosial pertama dan signifikan dengan penduduk yang ada di daerah asal, serta yang paling mengerti mengenai kondisi lingkungan daerah asal. Sehingga jika pindah domisili saat dewasa, mereka akan tetap menganggap bahwa daerah asal merupakan *rumah* pertama, dan daerah tempat mereka berdomisili saat ini merupakan *rumah* kedua. Sehingga dari penuturan Norris (1972), dapat dikatakan bahwa migran merupakan penduduk yang bersifat *bi local population*, karena akan selalu berhubungan dengan daerah asal.

Sehingga hubungan migran dengan daerah asal di negara-negara berkembang sangatlah erat (Connell, 1976) dan ini menjadi ciri khas fenomena migrasi dari negara-negara yang sedang berkembang.

Lee (1966), (Todaro, 1982), dan (Titus, 1978) dalam Mantra (2013) berpendapat bahwa motivasi seseorang untuk pindah adalah motif ekonomi. Ini muncul karena ketimpangan ekonomi antar daerah, dengan demikian kemungkinan peningkatan migrasi penduduk ke Kalimantan Timur terkait rencana pemindahan ibu kota baru sesuai dengan pernyataan ini. Todaro (1982) menyebutkan bahwa hal itu sebagai pertimbangan ekonomi yang rasional. Migrasi ke wilayah perkotaan atau urban memberikan dua harapan, yaitu memperoleh pekerjaan dan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dari yang telah diperoleh di pedesaan.

Perilaku mobilitas penduduk

Beberapa ahli berdasarkan penelitiannya menyatakan beberapa perilaku mobilitas penduduk, diantaranya adalah Ravenstein (1889), Thomas Stouffer (1940), Lee (1966), Norris (1972),

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 1	Hal: 27 - 39	April 2020
---	--	--------------	--------------	------------

Mabogunje (1970), dan Slyde (1961). Istilah perilaku mobilitas penduduk disebut oleh Ravenstein dengan hukum-hukum migrasi penduduk dalam Mantra (2013:187) adalah sebagai berikut:

1. Para migran cenderung memilih tempat terdekat sebagai daerah tujuan
2. Faktor paling dominan yang mempengaruhi seseorang untuk migrasi adalah sulitnya memperoleh pekerjaan di daerah asal dan terdapat kemungkinan memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik di daerah tujuan karena terdapat ekspektasi bahwa daerah tujuan harus memiliki kefaedahan wilayah (*place utility*) lebih tinggi dibandingkan dengan daerah asal.
3. Berita-berita atau kabar dari kerabat yang telah berpindah ke daerah lain merupakan informasi yang sangat penting bagi orang yang ingin bermigrasi.
4. Informasi negatif dari daerah tujuan mengurangi niat penduduk (migrasi potensial) untuk bermigrasi.
5. Semakin tinggi pengaruh kota terhadap seseorang, semakin besar tingkat mobilitasnya.
6. Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi frekuensi mobilitasnya.
7. Para migran cenderung memilih daerah tempat teman atau sanak saudara bertempat tinggal di daerah tujuan. Sehingga, arah dan arus mobilitas penduduk menuju ke arah asal datangnya informasi.
8. Pola migrasi bagi seseorang maupun sekelompok penduduk sulit diperkirakan. Hal ini terjadi karena banyak dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang mendadak atau tak terduga seperti bencana alam, peperangan, atau pun epidemi.
9. Penduduk yang masih muda dan belum menikah lebih banyak melakukan mobilitas dari pada mereka yang sudah menikah.
10. Penduduk yang berpendidikan tinggi biasanya lebih banyak melaksanakan mobilitas daripada yang berpendidikan rendah.

Lalu, setelah para pelaku mobilitas sampai di daerah tujuan—terutama kawasan urban, akan muncul beberapa perilaku mereka terutama sikap mereka terhadap masyarakat kota yang bisa digambarkan sebagai berikut:

1. Awalnya para pelaku mobilitas memilih daerah tujuan di mana kerabat bertempat tinggal di daerah tersebut.
2. Pada masa penyesuaian diri di kota, para migran terdahulu membantu mereka dalam menyediakan tempat menginap, membantu mencari pekerjaan, dan membantu bila kekeurangan uang, dan lain-lain.
3. Kepuasan terhadap kehidupan di masyarakat baru tergantung pada interaksi sosial para pelaku mobilitas dengan masyarakat tersebut.
4. Kepuasan terhadap kehidupan di kota tergantung pada kemampuan tiap individu untuk mendapatkan pekerjaan dan adanya peluang bagi anak-anak untuk berkembang.
5. Setelah menyesuaikan diri dengan kehidupan kota, para pelaku mobilitas pindah ke tempat tinggal dan pemilihan daerah tempat tinggal yang dipengaruhi oleh daerah tempat bekerja.
6. Keinginan untuk kembali ke daerah asal adalah fungsi kepuasan mereka dengan kehidupan di kota. Mereka tidak masalah jika harus bertempat tinggal pada tempat dengan kondisi yang serba kurang asal dapat memperoleh kesempatan ekonomi yang tinggi.
7. Kehidupan masyarakat di kota adalah sedemikian rupa, hal ini menyebabkan para migran cepat belajar untuk mengatasi rintangan-rintangan yang dihadapinya.
8. Perilaku migran adalah perilaku di antara orang kota dan orang desa.
9. Walaupun seorang migran telah berdomisili di daerah asal (mayoritas tempat kelahirannya) tetap menjadi 'rumah' yang pertama dan tinggal di daerah lain sebagai 'rumah' yang kedua. Sehingga kondisi ini membuat seorang migran sebagai *bi local population*.

Tabel berikut menggambarkan definisi migran berdasarkan keempat pertanyaan dalam sensus penduduk 1980 dalam Mantra (2013).

Pertanyaan	Migran
Provinsi tempat lahir	Seseorang yang dicacah (disensus) di suatu propinsi yang bukan propinsi tempat kelahirannya. Migran ini disebut dengan migran semasa hidup (<i>lifetime migrant</i>)
Lama tinggal di propinsi lain	Seseorang yang lamanya tinggal di propinsi sekarang lebih pendek dari umurnya
Tempat tinggal terakhir sebelum tinggal di propinsi lain	Seseorang yang propinsi tempat tinggal terakhir berbeda dengan propinsi tempat ia dicacah. Migran ini disebut dengan migran total (<i>total migrant</i>)
Propinsi tempat tinggal 5 tahun yang lalu	Seseorang di mana provinsi tempat tinggal sekarang berbeda dengan propinsi tempat tinggal 5 tahun yang lalu. Migran ini disebut dengan migran risen (<i>recent migrant</i>)

Sedangkan definisi non-migran berlawanan dengan tiap jenis migran, jika terdapat migran semasa hidup (*lifetime migrant*) maka non-migran semasa hidup ialah seseorang yang dicacah di propinsi tempat ia dilahirkan. Jika terdapat migran total (*total migrant*), maka non-migran untuk kategori ini ialah seseorang yang bertempat tinggal di propinsi sekarang selama hidupnya. Seseorang yang bertempat tinggal di propinsi sekarang selama hidupnya merupakan non-migran dari kategori migran kembali (*return migrant*). Seorang migran akan masuk kategori sebagai migran risen/baru (*recent migrant*) jika baru berdomisili di daerah lain kurang dari 5 tahun, dan

seseorang akan masuk kategori non-migran jika telah melewati batas waktu ini.

Dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa migran dapat dibedakan menjadi empat yaitu: migran semasa hidup (*lifetime migrant*), migran total (*total migrant*), migran kembali (*return migrant*), dan migran risen/baru (*recent migrant*).

Jenis Migrasi

Terdapat tujuh jenis migrasi yang dilakukan manusia, yaitu:

1. Transmigrasi
2. Imigrasi
3. Emigrasi
4. Diaspora
5. Mengungsi (*Asylum Seekers* atau *Refugee*)
6. Kolonisasi
7. Urbanisasi

Dari jenis-jenis migrasi ini, yang masuk dalam kategori migrasi nasional adalah transmigrasi dan urbanisasi.

Transmigrasi merupakan istilah yang diinisiasikan sejak periode penjajahan Belanda dan terus berlanjut dan berkembang pasca kemerdekaan. Jenis migrasi ini dibuat oleh pemerintah Indonesia dengan maksud memindahkan penduduk dari satu daerah yang padat (biasanya perkotaan) menuju daerah lain dengan populasi sedikit (biasanya daerah rural/pedesaan). Terdapat dasar hukum dalam pelaksanaan program ini, yaitu, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi, serta peraturan pemerintah yang paling baru yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian, serta Keppres dan Inpres yang mendukung.

Dari ketiga dasar hukum ini, terdapat definisi transmigrasi dan ketransmigrasian, ketentuan yang harus dipenuhi untuk Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) untuk sarana dan fasilitas publik, serta ketentuan mau pun indikator lainnya.

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 1	Hal: 27 - 39	April 2020
---	--	--------------	--------------	------------

Sehingga dapat disimpulkan bahwa transmigrasi merupakan program pemerintah dalam usaha menyebarkan penduduk-penduduknya dari wilayah populasi padat ke populasi yang lebih sedikit dengan tujuan pembangunan dan pemerataan penduduk.

Urbanisasi merupakan istilah migrasi yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa mobilitas penduduk dari kehidupan pedesaan menuju kawasan perkotaan (Tacoli, 2015).

Berdasarkan data dari World Urbanization Prospects 2020 kawasan Jabodetabek (yang merupakan area metropolitan) bersama banyak kota metropolitan lainnya di Asia seperti Osaka, Tokyo, Mumbai, Dhaka, Karachi, Shanghai, Chongqing, Guangzhou, Manila, Seoul, dan Beijing merupakan rumah untuk lebih dari 20 juta jiwa penduduk.

Kedua jenis migrasi penduduk ini sesuai dalam menggambarkan situasi rencana pemindahan ibu kota. Karena kedua wilayah yang menjadi kandidat rencana ibu kota baru—Kutai Kartanegara dan Paser Penajam Utara—bukan merupakan wilayah metropolitan, terdapat 6% sebaran jumlah penduduk di Pulau Kalimantan berdasarkan Distribusi Penduduk menurut Pulau Tahun 2015 yang diselenggarakan oleh BPS melalui SUPAS (2015), berada pada peringkat keempat setelah Jawa (56,66%), Sumatera (21,785), Sulawesi (7,33%), jarak antara distribusi penduduk di Pulau Jawa dengan Kalimantan terlalu timpang. Di Pulau Jawa sendiri terdapat beberapa kawasan metropolitan yang salah satunya dan juga yang memiliki populasi terbesar adalah Jabodetabek.

Sehingga walau kedua kandidat ibu kota baru di Kalimantan Timur, salah satunya nanti akan dijadikan 'kota', namun tetap dilihat dari jumlah dan distribusi penduduk, proses migrasi penduduk yang terjadi di sana nantinya serupa dengan transmigrasi karena berpindah dari wilayah berpopulasi padat (Jakarta) menuju wilayah berpopulasi sedikit (Kalimantan Timur—Kutai Kartanegara atau Paser Penajam Utara). Namun demikian, proses migrasi penduduk ini juga dapat dikategorikan sebagai urbanisasi, karena meski masih berpopulasi sedikit, wilayah ini akan menjadi ibu kota yang merupakan wilayah urban dan nantinya akan banyak mobilitas penduduk dari wilayah-wilayah pedesaan menuju ke ibu kota baru untuk mencari kesempatan ekonomi yang baik dan peluang pendapatan yang tinggi.

Deforestasi merupakan istilah aktivitas penebangan hutan. Saat ini deforestasi marak terjadi oleh berbagai masalah sosial, seperti korupsi politis di kalangan lembaga pemerintahan (Koyuncu & Yilmaz, 2009), ketidakadilan (Ceddia, 2019), pertumbuhan penduduk hingga ledakan penduduk (Marcoux, 2000; Butler, 2012), aktivitas transmigrasi dan urbanisasi (Rudel, 2005; DeFries, 2010), hingga globalisasi (Andrew & Graham, 2009).

Aktivitas transmigrasi yang sudah berjalan sejak jaman kolonial Belanda hingga saat ini berpengaruh besar dalam deforestasi di Indonesia, begitu juga dengan aktivitas urbanisasi pada masyarakat perkotaan—atau mobilitas penduduk menuju kawasan perkotaan (Rudel, 2005).

Aktivitas deforestasi ada yang dilakukan secara legal karena dilakukan oleh pemerintah untuk aktivitas non-hutan seperti kegiatan pertanian untuk masyarakat setempat atau perluasan lahan untuk pembangunan (Bertazzo, 2016; Bergen, 2015).

Deforestasi ilegal biasanya berskala besar dan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), karhutla merugikan berbagai pihak yang berada di sekitar nya, karena karhutla menyebabkan kemarau berkepanjangan yang akan menghentikan aktivitas sehari-hari masyarakat yang salah satunya adalah bekerja sebagai aktivitas ekonomi masyarakat, selain itu juga jika berkepanjangan maka akan menimbulkan masalah kesehatan dan kelompok anak-anak, ibu, dan para lansia adalah kelompok rentan yang akan pertama kali mendapat masalah kesehatan akibat karhutla (Tacconi, 2003) (KontraS, 2015).

Sehingga, jika rencana pemindahan ibu kota ini dilaksanakan tanpa menjadikan proteksi lingkungan sebagai pertimbangan utama, dikhawatirkan hanya akan menciptakan berbagai masalah-masalah lingkungan di ibu kota baru nanti, seperti yang telah terjadi di Jakarta sekarang (Greenpeace Indonesia, 2019; Tacconi, Luca, 2019).

Perencanaan dan Kebijakan Sosial (*Social Planning and Policy*)

Metode yang bekerja untuk populasi besar. Fokusnya adalah dalam mengevaluasi kebutuhan kesejahteraan dan layanan yang ada di daerah tersebut dan merencanakan cetak biru (*blueprint*) yang memungkinkan untuk pemberian layanan yang lebih efisien untuk masalah sosial. Karakteristik model ini adalah model dengan

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 1	Hal: 27 - 39	April 2020
---	--	--------------	--------------	------------

pendekatan teknis memecahkan masalah-masalah sosial substantif melalui perencanaan yang matang. Model ini dianggap responsif terhadap kebutuhan dan sikap masyarakat (Rothman, 1996).

Perencanaan dan kebijakan sosial adalah proses di mana pembuat kebijakan—legislator, lembaga pemerintah, perencana, dan, seringkali, penyandang dana—mencoba untuk memecahkan masalah masyarakat atau meningkatkan kondisi di masyarakat dengan merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang dimaksudkan untuk mendapatkan hasil tertentu. Kebijakan-kebijakan ini dapat berbentuk undang-undang, peraturan, insentif, kampanye media, program atau layanan, informasi—dengan berbagai kemungkinan.

Menurut Rothman (1996) pengorganisasian masyarakat yang menggunakan pendekatan ini berupa pengumpulan fakta dari masalah dan keputusan berdasarkan pada tindakan yang paling rasional untuk dilakukan. Lalu, taktik perubahan karakteristik dan teknik ini melalui konsensus atau konflik.

Locality development

Metode bekerja dengan organisasi masyarakat. Awalnya digunakan oleh Gerakan Rumah Pemukiman, fokus utamanya adalah pembangunan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Pengembangan kepemimpinan, saling membantu, dan pendidikan populer dianggap sebagai komponen penting untuk proses partisipatif ini. *Locality development* atau dapat diartikan sebagai pengembangan berbasis (masyarakat) lokal ditujukan untuk memenuhi kebutuhan populasi target di area tertentu (Rothman, 1968).

Menurut Rothman (1996) pengorganisasian masyarakat yang menggunakan pendekatan ini berupa sekumpulan orang dari berbagai lapisan masyarakat terlibat dalam menentukan dan memecahkan masalah mereka sendiri. Lalu, taktik perubahan karakteristik dan teknik ini melalui konsensus berupa komunikasi di antara komunitas kelompok dan minat; diskusi kelompok.

Kebijakan Penghijauan Kembali bersama Masyarakat (*Community Reforestation Policies*) dan Pengembangan Pedesaan (*Rural Development*)

Keterkaitan antara program reboisasi dan pengentasan kemiskinan pedesaan pertama kali diakui pada Kongres Kehutanan Dunia (*World*

Forestry Congress) kedelapan di Jakarta pada tahun 1978. Kongres ini menganjurkan partisipasi masyarakat pedesaan dalam pengelolaan hutan sebagai bagian dari pembangunan pedesaan (Pandey, 1996).

Pada tahun 1978 juga, Bank Dunia mengeluarkan pernyataan kebijakan terkait hutan baru yang menekankan pembangunan pedesaan berbasis kehutanan (Pardo, 1985).

Pada 1980, Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa Bangsa (UNFAO) mengartikulasikan hubungan erat antara pembangunan pedesaan dan strategi penghijauan kembali dalam rekomendasi berikut: a) strategi kehutanan harus didasarkan pada partisipasi aktif dan sukarela masyarakat miskin pedesaan; b) hutan, lahan hutan dan industri hutan harus memiliki potensi signifikan untuk pengentasan kemiskinan dan untuk mempromosikan perubahan sosial di daerah pedesaan; dan c) kebijakan kehutanan harus berorientasi dan dirancang untuk mendukung pembangunan pedesaan secara permanen (Rao, 1987a; Rao, 1987b).

Beberapa faktor sosial penting yang berkontribusi pada kemandirian masyarakat dan pengembangan masyarakat pedesaan berkelanjutan melibatkan pemahaman tentang populasi dan lembaga setempat; mendapatkan kepercayaan masyarakat, partisipasi masyarakat dan pemberdayaan; pemahaman tentang akar penyebab konflik masyarakat dan keinginan untuk menyelesaikannya; dan merancang dan mengimplementasikan program berbasis kebutuhan (Pandey, 1996).

Oakley (1991) berpendapat bahwa partisipasi masyarakat pedesaan yang lebih besar dalam pembangunan sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, untuk mendorong kemandirian mereka dan untuk meningkatkan cakupan program. Namun, studi evaluasi terhadap program-program pembangunan menunjukkan bahwa banyak dari program-program ini dikendalikan dan dirancang secara eksternal dari atas-bawah dengan sangat sedikit pemahaman tentang masyarakat lokal atau masukan dari mereka (Kottak, 1985; Oakley, 1991; Uphoff, 1985; Utting, 1994).

Proyek yang sukses, di sisi lain, telah mengikuti strategi pengembangan dan implementasi proyek yang berorientasi pada orang (Kottak, 1985). Mengacu pada dampak negatif dari kebijakan dan program hutan tahun 1980-an terhadap masyarakat miskin pedesaan di Amerika

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 1	Hal: 27 - 39	April 2020
---	--	--------------	--------------	------------

Tengah, Utting (1994) berpendapat bahwa kebijakan dan program ini sering dikembangkan tanpa pemahaman yang memadai dan dimasukkan ke dalam rancangan proyek aspek sosial-ekonomi dan politik kehidupan masyarakat di daerah pedesaan. Dia menegaskan bahwa kebijakan dan program hutan harus dikembangkan dalam konteks pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih luas dan bahwa "kesejahteraan manusia harus melibatkan dialog intensif dengan berbagai kelompok lokal dalam tahap desain perlindungan hutan atau program dan proyek penanaman pohon" (hal. 245- 246).

Pekerja sosial dilatih secara unik untuk terlibat dalam pembangunan pedesaan melalui organisasi pembangunan ini. Mereka dapat secara efektif mendapatkan kepercayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat, membantu mengidentifikasi kekuatan dan keterbatasan komunitas, membantu memobilisasi sumber daya internal, dan menghubungkan komunitas lokal dengan berbagai sumber daya eksternal.

Ada banyak bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan. Dalam beberapa proyek ada kurangnya partisipasi lokal yang nyata; masyarakat setempat memberikan informasi, tenaga kerja, memberikan pendapat atas permintaan, atau menggunakan layanan tetapi tidak memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan dan tidak memiliki suara dalam desain dan implementasi proyek (Drijver, 1991). Oakley (1991) menyebut ini sarana atau partisipasi pasif.

Ketika partisipasi digunakan sebagai sarana, partisipasi lokal diupayakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dari proyek-proyek pembangunan, dan partisipasi berkurang setelah tugas selesai (Oakley, 1991).

Dalam partisipasi masyarakat yang sebenarnya, masyarakat setempat membuat keputusan besar mengenai desain dan implementasi proyek pembangunan, dan staf proyek adalah katalis dan perantara (Drijver, 1991). Oakley (1991) menyebut bentuk partisipasi orang-orang ini sebagai tujuan. Di sini, partisipasi masyarakat adalah proses yang aktif dan dinamis "yang terungkap seiring berjalannya waktu dan yang tujuannya adalah untuk mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat pedesaan untuk melakukan intervensi lebih langsung dalam prakarsa pembangunan. Proses semacam itu mungkin tidak memiliki tujuan atau arah yang terukur yang telah ditentukan sebelumnya. Sebagai tujuan itu sendiri, partisipasi

harus menjadi fitur permanen dari setiap proyek pembangunan, bagian intrinsik yang tumbuh dan menguat ketika proyek berkembang" (hal. 116). Proses partisipasi masyarakat itu sendiri dapat memberdayakan masyarakat pedesaan karena berkontribusi pada komunikasi, keterampilan kepemimpinan dan tawar menawar memungkinkan masyarakat lokal untuk memutuskan dan mengambil tindakan yang mereka yakini diperlukan untuk perkembangan mereka (Oakley, 1991).

Sebagaimana dapat dibuktikan, pembangunan pedesaan—baik yang terkait dengan kehutanan, kesehatan, atau pertanian—berkaitan dengan upaya memunculkan kepercayaan masyarakat, melibatkan mereka sepenuhnya dan memastikan bahwa manfaatnya menjangkau orang-orang di anak tangga rendah tatanan ekonomi. Ini adalah alasan utama pekerjaan sosial. Pekerja sosial, bagaimanapun, telah menjadi pemain marjinal dalam pembangunan pedesaan. Midgley (1981) menyimpulkan bahwa ini disebabkan oleh pengalihan paket pendidikan pekerjaan sosial yang tidak sesuai, fokus individu, dari negara-negara industri Barat ke negara-negara berkembang. Pekerjaan sosial sebagai sebuah profesi berasal dari negara-negara industri barat di sekitar waktu yang sama dengan konsep pembangunan pedesaan di negara-negara berkembang, khususnya Asia Selatan. Penekanan awal keduanya sama. Program pembangunan pedesaan antara pertengahan 1920-an dan awal 1950-an dilokalisasi secara individual; mereka berfokus terutama pada kesejahteraan individu dan perubahan di sektor sosial dan sebagian besar non-ekonomi. Misalnya, filosofi Gandhi tentang pembangunan pedesaan adalah gerakan sosial untuk memberdayakan populasi pedesaan untuk membantu diri mereka sendiri. Profesi pekerjaan sosial dikembangkan terutama untuk memperbaiki masalah sosial melalui rehabilitasi individu menggunakan metode kerja kasus, kerja kelompok atau organisasi masyarakat (Midgley, 1981). Selama bertahun-tahun banyak negara berkembang telah mengadopsi pengajaran pekerjaan sosial dengan prinsip-prinsip praktik yang sama dengan yang digunakan di barat (Midgley, 1981).

Fokus pembangunan pedesaan, di sisi lain, telah bergeser selama bertahun-tahun. Pada 1950-an negara-negara berkembang mulai meluncurkan berbagai strategi pembangunan pedesaan tingkat nasional yang terutama berfokus pada

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 1	Hal: 27 - 39	April 2020
---	--	--------------	--------------	------------

pengembangan ekonomi penduduk pedesaan. Untuk mendorong inisiatif pembangunan nasional ini, berbagai macam teknologi manusia dan material dipindahkan dari negara-negara industri barat ke negara-negara berkembang. Para kritikus berpendapat bahwa kerangka kerja pembangunan pedesaan berbasis transfer gagal mencapai tujuan yang diinginkan karena desain sentral, top-down, terkontrol dan implementasi program pembangunan tanpa masukan dari masyarakat lokal (Wignaraja, 1984). Pada tahun 1970-an ada kesadaran yang tumbuh tentang perlunya partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan untuk menghindari keuangan masyarakat lokal atau bentuk-bentuk ketergantungan lainnya pada proyek-proyek pembangunan (Chambers, 1983; Uphoff, 1985). Pada awal 1980-an, penekanan lebih besar ditempatkan pada penguatan atau pembangunan lembaga dan pada mendapatkan partisipasi nyata atau langsung masyarakat dalam pembangunan pedesaan. Tujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan ditambahkan setelah pertengahan 1980-an.

Kesejahteraan sosial (*social work*) telah berada di garis samping dalam transformasi pembangunan pedesaan ini. Sebagai sebuah profesi, pekerjaan sosial di negara-negara berkembang telah menderita imperialisme budaya (Midgley, 1981), dan ini telah mempengaruhi kontribusinya terhadap pembangunan pedesaan. Faktor lain yang menjelaskan peran marginal pekerja sosial dalam pembangunan adalah bahwa selama tahun 1960-an dan 1970-an, sebagian besar pekerjaan pembangunan pedesaan di negara-negara berkembang dilakukan tanpa banyak perhatian pada dimensi sosial dan budaya atau masukan dari ilmuwan sosial. Misalnya, departemen kehutanan mengelola hutan negara tetapi sistem manajemennya direkayasa dan dipaksakan secara eksternal. Para profesional kehutanan menegakkan hukum hutan untuk melindungi hutan dari orang.

Pekerja sosial, juga, harus mengklaim bagian mereka dari tanggung jawab profesional dalam pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat tidak hanya karena paradigma pembangunan baru ini semakin interdisipliner dan berfokus pada masyarakat tetapi juga karena pekerja sosial lebih cocok untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Program pembangunan pedesaan saat ini, termasuk program kehutanan masyarakat, fokus pada masyarakat. Keberlanjutan prakarsa pembangunan pedesaan

bergantung pada kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama untuk memobilisasi sumber daya keuangan, manajerial, dan teknis eksternal dan internal sehingga program yang bermanfaat dapat terus berkembang setelah dukungan eksternal mereka berakhir. Pekerja sosial komunitas (*community social worker*) yang terlatih secara profesional dapat memperoleh kepercayaan komunitas, membantu masyarakat setempat mengidentifikasi kekuatan dan keterbatasan mereka, memperkuat atau membangun institusi untuk aksi kolektif mereka, dan membantu mereka memobilisasi sumber daya eksternal dan internal sehingga kegiatan proyek mencapai keberlanjutan jangka panjang (Pandey 1996).

KESIMPULAN

Rencana pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur menimbulkan beragam tanggapan pro-kontra dari berbagai pihak. Indikator pemilihan kandidat ibu kota baru berdasarkan dari oposisi terhadap permasalahan yang telah dihadapi DKI Jakarta, yaitu situasi terlalu padat menimbulkan permasalahan macet, polusi, rentan banjir, dan masalah geografis seperti dataran yang sudah menurun serta dekat dengan zona tumbukan lempeng.

Namun, meski pun Kalimantan Timur memenuhi indikator berlawanan dengan permasalahan Kota Jakarta, masih tetap memiliki permasalahan sosial yang sering sekali terjadi yakni isu masalah lingkungan hidup yang sering terjadi, deforestasi. Deforestasi meningkat jika rencana ini diterapkan tanpa perhitungan matang, ditambah dengan area hutan gambut sebagai vegetasi mayoritas merupakan area rawan terbakar, sehingga dapat menyebabkan.

Kemungkinan masifnya migrasi penduduk tanpa perencanaan proteksi lingkungan melalui masyarakat itu sendiri nantinya mengakibatkan potensi deforestasi besar-besaran karena ekspansi wilayah menurunkan kuantitas hutan dan berdampak pada satwa langka yang tinggal di dalam nya.

Peningkatan deforestasi besar-besaran karena potensi migrasi penduduk yang masif akan terjadi karena adanya perubahan interaksi ekonomi dengan penduduk setempat yang akan memerlukan sumber daya alam.

Aktivitas ekonomi ini berada di sekitar area hutan gambut yang memudahkan api menjalar lebih cepat dan besar, ditambah dengan isu perubahan iklim yang terjadi membuat

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 1	Hal: 27 - 39	April 2020
---	--	--------------	--------------	------------

pemadaman kebakaran hutan ini lebih sulit dapat menghentikan aktivitas ibu kota baru dalam jangka waktu yang lama serta kabut asap yang dihasilkan dapat bertahan lebih lama dan berimbas pada masalah kesehatan dan ekonomi masyarakat.

Sehingga perlu peran sinergis antara pemerintah dan masyarakat, melalui perspektif disiplin kesejahteraan sosial dengan menggunakan pendekatan pengorganisasian masyarakat (*community organizing*) yakni perencanaan dan kebijakan sosial di mana pemerintah perlu membuat kebijakan penghijauan kembali bersama masyarakat (*community restoration policies*) serta pemberdayaan berbasis masyarakat lokal (*locality development*) melalui pengembangan pedesaan (*rural development*).

Pekerja sosial membantu masyarakat lokal mengidentifikasi kekuatan dan keterbatasan mereka, memperkuat atau membangun institusi untuk aksi kolektif mereka, dan membantu mereka memobilisasi sumber daya eksternal dan internal sehingga kegiatan proyek dapat mencapai keberlanjutan jangka panjang, sedangkan pekerja sosial juga dapat memastikan rencana dan kebijakan sosial yang diusulkan pemerintah tepat guna dan dapat diterapkan.

Daftar Pustaka

- Agustinus Beo Da Costa. (2019, Agustus 26). *World News*. Retrieved from Reuters: <https://www.reuters.com/article/us-indonesia-politics-capital/indonesian-president-unveils-site-of-new-capital-on-borneo-island-idUSKCN1VG0FC>
- Akbar, A. (2016). *Pemahaman dan Solusi Masalah Kebakaran Hutan di Indonesia*. Bogor: FORDA Press.
- Andrew, M., & Graham, A. (2009). Session 5: Impacts of globalization on forests and forestry in Asia and the Pacific. In R. N. Leslie, *The future of forests in Asia and the Pacific: outlook for 2020*. Bangkok: RAP PUBLICATION.
- BBC Indonesia. (2019, Agustus 27). *BBC News*. Retrieved from BBC Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-49482670>
- BBC Indonesia. (2019, Agustus 28). *BBC News*. Retrieved from BBC Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49487400>
- Bergen, M. (2015). *Without Forest Policy Reform, Indonesia Won't Reach Emissions Reduction Goal*. Retrieved from Conservation International: <https://www.conservation.org/blog/without-forest-policy-reform-indonesia-won-t-reach-emissions-reduction-goal>
- Bertazzo, S. (2016). *In palm oil, Liberia sees economic boom — but forests may lose*. Retrieved from Conservation International: <https://www.conservation.org/blog/in-palm-oil-liberia-sees-economic-boom-but-forests-may-lose/>
- Butler, R. A. (2012, Juli 11). *POPULATION, POVERTY, and DEFORESTATION*. Retrieved from Mongabay: <https://rainforests.mongabay.com/0816.htm>
- Ceddia, M. G. (2019). The impact of income, land, and wealth inequality on agricultural expansion in Latin America. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 116(7), 2527-2532.
- Chambers, R. (1983). *Rural development: Putting the last first*. London: Longman.
- CNBC Indonesia. (2019, Oktober 3). *CNBC Indonesia News*. Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191003151431-4-104204/pemerintah-pastikan-200-ribu-pns-pindah-ke-ibu-kota-baru>
- Connell, J. (1976). *Migration from rural areas: The evidence from village studies*. Delhi: Oxford University Press.
- Conservation International. (n.d.). *DEFORESTATION: 11 FACTS YOU NEED TO KNOW*. Retrieved from Conservation International: <https://www.conservation.org/stories/11-deforestation-facts-you-need-to-know>
- DeFries, R. S. (2010). Deforestation driven by urban population growth and agricultural trade in the twenty-first century. *Nature Geoscience*, 3(3), 178-181.
- Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Timur. (2017, Januari 31). *Stop Illegal Fishing Di Kalimantan Timur*. Retrieved from Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Timur: <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/stop-illegal-fishing-di-kalimantan-timur/>

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 1	Hal: 27 - 39	April 2020
---	--	--------------	--------------	------------

- DKP3A Kaltim. (2019). *Grafik Data Penduduk*. Retrieved from Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur: <http://dkp3a.kaltimprov.go.id/e-infoduk/>
- Drijver, C. A. (1991). People's participation in environmental projects in developing countries. *Landscape and Urban Planning*, 20, 129-139.
- Eva Safitri. (2019, Agustus 25). *detikNews*. Retrieved from Detik: <https://news.detik.com/berita/d-4679659/bmkg-aktivitas-gempa-di-kalimantan-paling-rendah>
- Greenpeace Indonesia. (2019, Agustus 27). *Siaran Pers*. Retrieved from Greenpeace Indonesia: <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/3652/tanggapan-greenpeace-indonesia-terhadap-rencana-pemindahan-ibu-kota-indonesia-ke-kalimantan-timur/>
- Greenpeace Indonesia. (2019, Agustus 27). *Tanggapan Greenpeace Indonesia Terhadap Rencana Pemindahan Ibukota Indonesia ke Kalimantan Timur*. Retrieved from Greenpeace Indonesia: <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/3652/tanggapan-greenpeace-indonesia-terhadap-rencana-pemindahan-ibu-kota-indonesia-ke-kalimantan-timur/>
- Kottak, C. P. (1985). When people don't come first-Some sociological lessons from completed projects. *Putting people first: Sociological Variables in Rural Development*, 325-356.
- Koyuncu, C., & Yilmaz, R. (2009). The impact of corruption on deforestation: a cross-country evidence. *The Journal of Developing Areas*, 213-222.
- Lee, E. S. (1966). A theory of migration. *Demography*, 3(1), 47-57.
- Mabogunje, A. L. (1970). Systems approach to a theory of rural-urban migration. *Geographical analysis*, 2(1), 1-18.
- Manik, J. M., & Marasabessy, M. D. (2010). Tenggelamnya Jakarta dalam Hubungannya dengan Konstruksi Bangunan Beban Megacity. *Makara Journal of Science*, 69-74.
- Mantra, I. B. (1978). *Mobilitas Penduduk dari Desa ke Kota*. Jakarta: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Mantra, I. B. (2003). *Demografi Umum Edisi Kedua*. Yogyakarta: Pustaka.
- Marcoux, A. (2000). Population and deforestation. *Population and the Environment*.
- Midgley, J. (1981). *Professional imperialism: Social work in the Third World*. London: Heinemann Educational Books Ltd.
- Minton, G., Smith, B. D., Braulik, G. T., Krebs, D., Sutaria, D., & Reeves, R. (2017). *Orcaella brevirostris*. *The IUCN Red List of Threatened Species*.
- Norris, R. E. (1972). Migration as spatial interaction. *Journal of Geography*, 71(5), 294-301.
- Oakley, P. (1991). The concept of participation in development. *Landscape and Urban Planning*, 20, 115-122.
- Pandey, S. (1996). Deforestation and rural poverty in developing countries: The role of social work. *The Journal of Sociology and Social Welfare*, 23, 93-111.
- Pardo, R. D. (1985). Forestry for people: Can it work? *Journal of Forestry*, 83(12).
- Rao, Y. S. (1987a). Programmes of participatory forestry development in selected countries of Asia.
- Rao, Y. S. (1987b). Role of non-governmental organizations (NGOs) in community forestry.
- Ravenstein, E. G. (1889). The laws of migration. *Journal of the royal statistical society*, 52(2), 241-305.
- Rothman, j. (1968). Three models of community organization practice. *Social work practice*, 25, 16-47.
- Rothman, J. (1996). The Interweaving of Community Intervention Approaches. *Journal of Community Practice*, 69-99.
- Rudel, T. K. (2005). *Tropical forests: regional paths of destruction and regeneration in the late twentieth century*. Columbia University Press.
- Slyde, M. J. (1961). The Causes of Labour Migration. *Migrant Labour in Africa Soutj of The Sahara*.
- Tacconi, Luca. (2019, September 3). *The Conversation — In English*. Retrieved from The Conversation: <https://theconversation.com/moving-indonesias-capital-city-wont-fix-jakartas->

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 1	Hal: 27 - 39	April 2020
---	--	--------------	--------------	------------

problems-and-will-increase-fire-risk-in-borneo-122639

- Tacoli, C. (2015). *Urbanisation, rural-urban migration and urban poverty*. London: International Institute for Environment and Development.
- Titus, M. J. (1978). Interregional migration in Indonesia as a reflection of social and regional inequalities. *Tijdschrift voor economische en sociale geografie*, 69(4), 194-204.
- Todaro, M. P. (1982). *Economics for a developing world: An introduction to principles, problems and policies for development*. Hongkong: Longman.
- Uphoff, N. (1985). Fitting projects to people. *Putting people first: Sociological Variables in Rural Development*, 359-395.
- Utting, P. (1994). Social and political dimensions of environmental protection in Central America. *Development and Change*, 25(1), 231-259.
- Wignaraja, P. (1984). Towards a theory and practice of rural development. *Development*.
- Yusuf, R. (2003). ANALISIS VEGETASI DAN DEGRADASI JENIS TUMBUHAN HUTAN GAMBUT SETELAH KEBAKARAN DIKAWASAN TAMAN NASIONAL TANJUNG PUTING KALIMANTAN TENGAH. *Berita Biologi*, 5(3), 277-283.